

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Penggunaan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua

Mariam Pasanda^{*}, John Agustinus^{**}, dan Dani Melmambessy^{***}

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

^{**} Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

^{***} Dosen Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 1 Juli 2025

Disetujui 25 Juli 2025

Keywords:

Komitmen,
Penyempurnaan,
Sumberdaya,
Penghargaan,
Sanksi

ABSTRAK

Abstract : *The Government Policy variable has a positive and significant effect on Information System Use. This means that the better the policies implemented by the government, the higher the level of information system use in that agency. The Budget Absorption variable has a positive and significant effect on Information System Use. This means that efficient budget absorption allows for the procurement of better technology devices, which supports more optimal use of information systems in data management. The Government Policy variable has a positive effect on Financial Report Quality, although this effect is not significant. This indicates that while policies provide guidelines for budget management and financial reporting, they are not strong enough to directly improve financial report quality.*

Abstrak : Variabel Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Sistem Informasi. Ini berarti semakin baik kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi tingkat penggunaan sistem informasi yang ada di instansi tersebut. Variabel Penyerapan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Sistem Informasi. Ini artinya penyerapan anggaran yang efisien memungkinkan pengadaan perangkat teknologi yang lebih baik, yang mendukung penggunaan sistem informasi yang lebih optimal dalam pengelolaan data. Variabel Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, meskipun pengaruh ini tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memberikan pedoman untuk pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, kebijakan tersebut tidak cukup kuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara langsung.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Mariam Pasanda,
Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jln. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : pasandamariam.08@gmail.com

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini meliputi pengaturan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan negara dalam hal ini melalui regulasi dan sistem yang terintegrasi. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang mewajibkan pencatatan berbasis akrual, sehingga seluruh hak dan kewajiban keuangan tercatat secara akrual dan utuh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi informasi dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat mengambil keputusan yang berbasis pada data yang akurat dan dapat dipercaya.

Beberapa definisi lain turut memperkuat pemahaman ini, antara lain: Mc Rae dan Wilde (1979) menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintah itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Thomas R. Dye (1972) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Babbie, E. (2010). menambahkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial. Sementara itu, Parker (1995) menekankan bahwa kebijakan pemerintah sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau respons terhadap suatu keadaan kritis. Keseluruhan definisi ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat secara luas.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2019 mengatur penyusunan dan penelaahan anggaran dengan fokus pada perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan yang ketat. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efektivitas program pemerintah. Dalam hal ini, penyerapan anggaran yang optimal menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Penyerapan anggaran yang tinggi menggambarkan realisasi dari manajemen keuangan yang baik dan mencerminkan keberhasilan koordinasi antara politik dan administratif dalam proses pengelolaan anggaran (Wildavsky, 1979).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan penyerapan anggaran dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui penggunaan sistem informasi sebagai variabel intervening. Penelitian oleh Sari dan Arfan (2021) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui sistem informasi. Selain itu, Damanik (2023) mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran juga berpengaruh pada pelaporan keuangan dengan sistem informasi sebagai variabel perantara. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Tri Ikyarti dan Nila Aprila (2019) yang meneliti pengaruh kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan melalui sistem informasi di daerah.

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Penyerapan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Penggunaan Sistem Informasi sebagai Variabel Intervening pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua?
- Apakah penyerapan anggaran berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua?
- Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua?
- Apakah penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua?
- Apakah penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua?
- Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui penggunaan sistem informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua?
- Apakah penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui penggunaan sistem informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua?

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Penelitian oleh Nurfadilah, R. dan Handayani, L. (2022) dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di Era Digital” merupakan studi

kuantitatif yang menggunakan metode survei terhadap pegawai di bagian keuangan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap efektivitas implementasi sistem informasi keuangan daerah. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi keuangan, dengan nilai t-hitung sebesar 5,683 dan nilai signifikansi $p = 0,000$ ($< 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,422 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menjelaskan 42,2% variasi dalam implementasi sistem informasi keuangan. Temuan ini konsisten dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan publik dapat membentuk persepsi kemudahan dan kegunaan suatu sistem, sehingga mendorong adopsi teknologi oleh pengguna dalam lingkungan organisasi publik.

Penelitian oleh Lucky Trihandaru Hernanda.(2020) dengan judul “Pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan” menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini menggali secara mendalam pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada instansi pemerintah pusat melalui wawancara terhadap pegawai Kementerian Keuangan dan pengguna aktif Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Data dianalisis dengan metode tematik dan pendekatan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan eksternal dari pemerintah pusat, seperti regulasi teknis dan instruksi resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen), sangat berperan dalam mendorong keberhasilan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Di sisi lain, lemahnya kebijakan internal dan kurangnya kesiapan infrastruktur menghambat efektivitas sistem. Penelitian ini diperkuat oleh teori institusional dari DiMaggio dan Powell (1983) yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik akan menyesuaikan diri dengan tekanan regulatif dari otoritas yang lebih tinggi untuk memperoleh legitimasi dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah bertindak sebagai pendorong utama dalam pembentukan praktik pelaporan keuangan berbasis sistem.

Penelitian oleh Rahmawati, Y. dan Prabowo, T. (2021) dengan judul “*Hubungan Penyerapan Anggaran terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Keuangan*” merupakan studi kuantitatif korelasional yang menganalisis hubungan antara tingkat realisasi anggaran dan efektivitas penggunaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola keuangan, lalu dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara penyerapan anggaran dengan efektivitas penggunaan sistem informasi, dengan nilai koefisien korelasi $r = 0,532$ dan $p = 0,002$. Artinya, semakin tinggi realisasi penyerapan anggaran, semakin efektif pula pemanfaatan sistem informasi keuangan untuk mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah. yang menyatakan bahwa efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola dan menggunakan sumber daya termasuk anggaran secara efisien untuk mencapai tujuan kelembagaan.

Kebijakan pemerintah merupakan instrument formal yang dikeluarkan oleh Lembaga eksekutif untuk mengatur pelaksanaan fungsi-fungsi negara dan mencapai tujuan tertentu. Henderson dan Peirson (2011) mengemukakan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan negara, kebijakan pemerintah mencakup pengaturan fiskal, pengelolaan anggaran, hingga pengawasan keuangan agar tercapai efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. menekankan pentingnya peran kebijakan dalam transformasi birokrasi menuju sistem yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, termasuk dalam mendorong penggunaan teknologi digital. Di lingkungan sektor publik, peran kebijakan pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator implementasi teknologi yang bertujuan memperbaiki efisiensi kerja dan transparansi. DiMaggio dan Powell (1983) dalam teori Institutional Isomorphism menjelaskan bahwa lembaga pemerintah cenderung menyesuaikan praktiknya mengikuti tekanan eksternal yang bersifat normatif, mimetik, dan koersif. Tekanan normatif berupa kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat sering kali menjadi pendorong utama dalam mengadopsi sistem informasi sebagai sarana penguatan akuntabilitas fiskal dan pelaporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Keuangan (2020), mewajibkan penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan ini mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan mampu menyajikan data yang relevan, andal, dan tepat waktu.

Moon dan Norris (2005) dalam teori Government Information Technology Policy menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi di sektor publik sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan dirancang secara eksplisit untuk mendukung digitalisasi, maka

organisasi akan terdorong untuk mengalokasikan sumber daya, membangun infrastruktur, dan mengubah proses kerja untuk mengadopsi sistem informasi.

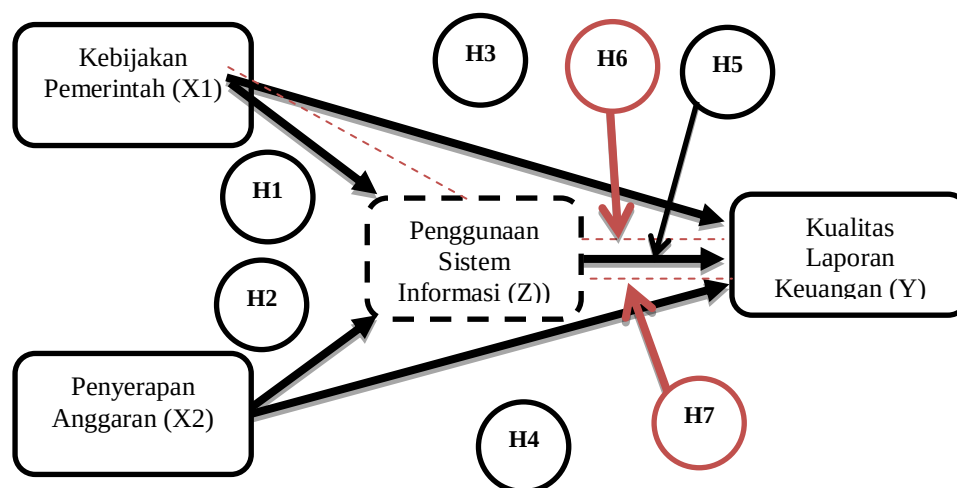
Penyerapan anggaran adalah proses penggunaan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah (Anthony & Govindarajan, 2011). Penyerapan anggaran merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pemerintah. Teori-teori yang berkaitan dengan penyerapan anggaran tidak hanya menjelaskan realisasi belanja, tetapi juga mengaitkannya dengan kualitas perencanaan, kemampuan kelembagaan, serta dukungan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan anggaran secara optimal.

Davis (1989) dalam Technology Acceptance Model (TAM) menyatakan bahwa penerimaan terhadap penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh dua faktor utama: persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi terhadap manfaat. Jika sistem dianggap mudah digunakan dan mampu meningkatkan produktivitas, maka kemungkinan besar akan diadopsi dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sektor pemerintah mencerminkan akuntabilitas publik yang tinggi. Menurutnya, laporan keuangan yang berkualitas bukan hanya menyajikan informasi tentang penggunaan anggaran, tetapi juga memberikan transparansi dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan konseptual antara variabel yang diteliti, yakni kebijakan pemerintah dan penyerapan anggaran sebagai variabel independent (variabel bebas), kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen (variabel terikat), dan penggunaan sistem informasi sebagai variabel intervening (mediator), khususnya pada instansi pemerintah seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian
Sumber : Kreasi Penulis, 2025

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian adalah :

- H1 : Terdapat pengaruh antara Kebijakan Pemerintah terhadap Penggunaan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
- H2 : Terdapat pengaruh antara Penyerapan Anggaran terhadap Penggunaan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
- H3 : Terdapat pengaruh antara Kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
- H4 : Terdapat pengaruh antara Penyerapan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
- H5 : Terdapat pengaruh antara Penggunaan Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

- H6 : Terdapat pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penggunaan Sistem Informasi sebagai variabel intervening pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
- H7 : Terdapat pengaruh Penyerapan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penggunaan Sistem Informasi sebagai variabel intervening pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Definisi Operasional

Agar terdapat pemahaman dan persepsi yang sama terhadap penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka dikemukakan batasan-batasan definisi operasional yang akan dipakai sebagai acuan sebagai berikut :

Tabel 1 Definisi Operasional dan Indikator Penelitian

No	Variabel Penelitian	Sumber Teori	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kebijakan Pemerintah (X1)	Henderson & Peirson (2011); Mikesell (2017)	- Kejelasan kebijakan - Pembaruan regulasi - Pemahaman pegawai terhadap kebijakan - Fleksibilitas kebijakan - Efektivitas implementasi kebijakan	Skala Likert lima poin
2	Penyerapan Anggaran (X2)	Allen dan Tommasi (2001), Schick (1998), dan Mardiasmo (2018)	- Ketepatan waktu penyerapan - Pengaruh kendala birokrasi - Perencanaan anggaran unit kerja - Pengawasan penyerapan - Kesesuaian realisasi anggaran	Skala Likert lima poin
3	Penggunaan Sistem Informasi (Z) sebagai Variabel Intervening	Davis (1989), McLeod dan Schell (2007)	- Kemudahan proses pelaporan - Akurasi laporan - Kenyamanan pengguna - Pembaruan sistem - Pengurangan kesalahan pelaporan	Skala Likert lima poin
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai Variabel Dependen	Standards Board (IASB, 2010), Kieso et al. (2019), dan Mardiasmo (2018),	- Kepatuhan terhadap standar akuntansi - Transparansi dan akurasi data - Kegunaan laporan dalam pengambilan keputusan - Ketepatan waktu dan kemudahan akses - Audit dan akuntabilitas	Skala Likert lima poin

Sumber : Data diolah, 2025

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji hubungan kausal atau pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel, yaitu : kebijakan pemerintah (X1), penyerapan anggaran (X2), kualitas laporan keuangan (Y), dan penggunaan sistem informasi (Z).

Menurut Sugiyono (2021), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Pendekatan ini bersifat objektif dan sistematis serta menggunakan angka sebagai dasar analisis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Berdasarkan data kepegawaian internal, jumlah pegawai aktif pada saat ini berjumlah 70 pegawai.

Tabel 2 Populasi Penelitian

Kategori Responden	Jumlah	Keterangan
Pegawai Pengelola Keuangan	6 Orang	Bertugas dalam pelaksanaan, pencatatan keuangan
Pegawai Penyusun Laporan Keuangan	4 Orang	Menyusun laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan dokumen pelaporan lainnya
Pegawai Penyusunan Anggaran	10 Orang	Bertugas dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran, serta memastikan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah.
TOTAL RESPONDEN	20 Orang	

Sumber : Data diolah, 2025

Analisa Kuantitatif adalah analisa yang berupa angka-angka. Dalam penelitian ini menggunakan analisis *Structural Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). *Structural Equation Modeling* (SEM) termasuk teknik analisis yang dimungkinkan pengujian korelasi antar variabel yang kompleks untuk mendapatkan cerminan lengkap keseluruhan model. Model struktural dan measurement mampu diuji secara bersamaan dalam SEM (Ghozali, 2021).

Partial Least Square tidak hanya digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2021). Dengan menggunakan analisa kuantitatif, data dianalisis secara statistik dengan bantuan perangkat lunak seperti *Smart Partial Least Squares* (SmartPLS) untuk analisis dasar, seperti uji validitas dan reliabilitas, uji jalur (*path analysis*). Uji analisis PLS melibatkan dua evaluasi yaitu Outer dan Inner model

Hasil Dan Pembahasan

Hasil statistik deskriptif diperuntukan untuk melihat rata-rata jawaban responden terhadap variabel penelitian yang meliputi; Kebijakan Pemerintah, Penyerapan Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan dan Penggunaan Sistem Informasi, hasil tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut.

a. Variabel Kebijakan Pemerintah (X1)

Variabel kebijakan pemerintah dalam penelitian ini di bentuk dari 5 indikator, dimana hasil rata-rata pernyataan responden terhadap kebijakan pemerintah tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3 Jawaban Responden Variabel Kebijakan Pemerintah (X1)

Indikator	Pernyataan	Nilai rata-rata
X1.1	Kejelasan Kebijakan - Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan di instansi saya sudah jelas dan mudah dipahami.	4.0
X1.2	Konsistensi dan Pembaruan Regulasi - Regulasi terkait anggaran dan laporan keuangan selalu diperbarui sesuai kebutuhan.	4.4
X1.3	Pemahaman Pegawai terhadap Kebijakan - Saya memahami kebijakan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah di instansi saya.	4.5
X1.4	Fleksibilitas Kebijakan - Kebijakan pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran di instansi saya.	3.8
X1.5	Efektivitas Implementasi Kebijakan - Implementasi kebijakan anggaran berjalan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.	4.0
Nilai rata-rata variabel Kebijakan Pemerintah (X1)		4.13

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil Tabel 1 dan hasil Lampiran 2: Statistik Deskriptif, nilai rata-rata untuk lima pernyataan variabel Kebijakan Pemerintah (X1) menunjukkan hasil yang cukup positif. Nilai rata-rata tertinggi ditemukan pada item pernyataan X1.3 yaitu "Saya memahami kebijakan keuangan yang

diterapkan oleh pemerintah di instansi saya" dengan nilai 4.5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa memiliki pemahaman yang baik terkait kebijakan keuangan pemerintah. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan X1.4 yakni "Kebijakan pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran di instansi saya" dengan nilai 3.8, yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal fleksibilitas dan implementasi kebijakan. Sedangkan nilai rata-rata dari variabel Kebijakan Pemerintah (X1) sebesar 4.13 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dikategorikan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan di instansi ini masih dalam kategori yang baik, meskipun beberapa aspek seperti fleksibilitas kebijakan dapat lebih ditingkatkan lagi.

b. Variabel Penyerapan Anggaran (X2)

Variabel Penyerapan Anggaran (X2) terdiri dari 5 pernyataan, dimana nilai rata-rata pernyataan responden terhadap variabel Penyerapan Anggaran, dimana hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4 Jawaban Responden Variabel Penyerapan Anggaran (X2)

Indikator	Pernyataan	Nilai rata-rata
X2.1	Ketepatan Waktu Penyerapan Anggaran - Penyerapan anggaran di instansi saya berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan..	4.2
X2.2	Pengaruh Kendala Birokrasi - Kendala birokrasi mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di instansi saya.	4.6
X2.3	Perencanaan Anggaran oleh Unit Kerja - Setiap unit kerja memiliki perencanaan anggaran yang matang untuk mencegah sisa anggaran yang tidak terpakai.	4.4
X2.4	Pengawasan Penyerapan Anggaran - Pengawasan terhadap penyerapan anggaran dilakukan dengan baik di instansi saya.	4.0
X2.5	Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Rencana - Realisasi anggaran di instansi saya sesuai dengan perencanaan awal.	4.4
Nilai rata-rata variabel Penyerapan Anggaran (X2)		4.36

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil Tabel 2, nilai rata-rata untuk lima pernyataan variabel Penyerapan Anggaran (X2) menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai rata-rata tertinggi ditemukan pada item pernyataan X2.2 yaitu "Kendala birokrasi mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di instansi saya" dengan nilai 4.6, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa kendala birokrasi mempengaruhi penyerapan anggaran. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan X2.4 yakni "Pengawasan terhadap penyerapan anggaran dilakukan dengan baik di instansi saya" dengan nilai 4.0, yang menunjukkan bahwa meskipun pengawasan sudah dilakukan, masih ada ruang untuk peningkatan efektivitasnya. Sedangkan nilai rata-rata dari variabel Penyerapan Anggaran (X2) sebesar 4.36 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dikategorikan baik.

c. Variabel Penggunaan Sistem Informasi (Z)

Variabel Penggunaan Sistem Informasi (Z) terdiri dari lima pernyataan. Dari hasil analisa statistik deskriptif terhadap variabel penggunaan sistem informasi (Z) dimana nilai rata-rata tanggapan responden hasilnya sebagai berikut :

Tabel 5 Jawaban Responden Variabel Penggunaan Sistem Informasi (Z)

Indikator	Pernyataan	Nilai rata-rata
Z1	Kemudahan Proses Pelaporan - Sistem informasi keuangan yang digunakan mempermudah proses pelaporan keuangan.	4.2
Z2	Akurasi Laporan yang Dihasilkan - Sistem informasi keuangan membantu meningkatkan akurasi laporan keuangan.	4.6
Z3	Kenyamanan Pengguna - Saya merasa nyaman dan percaya diri dalam menggunakan sistem informasi keuangan.	4.4
Z4	Kesesuaian dan Pembaruan Sistem - Sistem informasi keuangan yang digunakan selalu diperbarui dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	3.8
Z5	Pengurangan Kesalahan dalam Pelaporan - Penggunaan sistem informasi keuangan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan.	4.0
Nilai rata-rata variabel Penggunaan Sistem Informasi (Z)		4.2

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil Tabel 3, nilai rata-rata untuk lima pernyataan variabel Penggunaan Sistem Informasi (Z) menunjukkan hasil yang positif. Nilai rata-rata tertinggi ditemukan pada item pernyataan Z2 yaitu "Sistem informasi keuangan membantu meningkatkan akurasi laporan keuangan" dengan nilai 4.6, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sistem informasi yang digunakan berperan penting dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan Z4 yakni "Sistem informasi keuangan yang digunakan selalu diperbarui dan sesuai dengan kebutuhan organisasi" dengan nilai 3.8, yang menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi sudah ada, pembaruan sistem perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan nilai rata-rata dari variabel Penggunaan Sistem Informasi (Z) sebesar 4.2 menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi di instansi ini sangat baik dan mendukung akuratnya laporan keuangan serta meningkatkan proses pelaporan keuangan secara keseluruhan.

d. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dari hasil analisa statistik deskriptif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan 5 pernyataan, dimana nilai rata-rata tanggapan responden hasilnya sebagai berikut.

Tabel 6 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

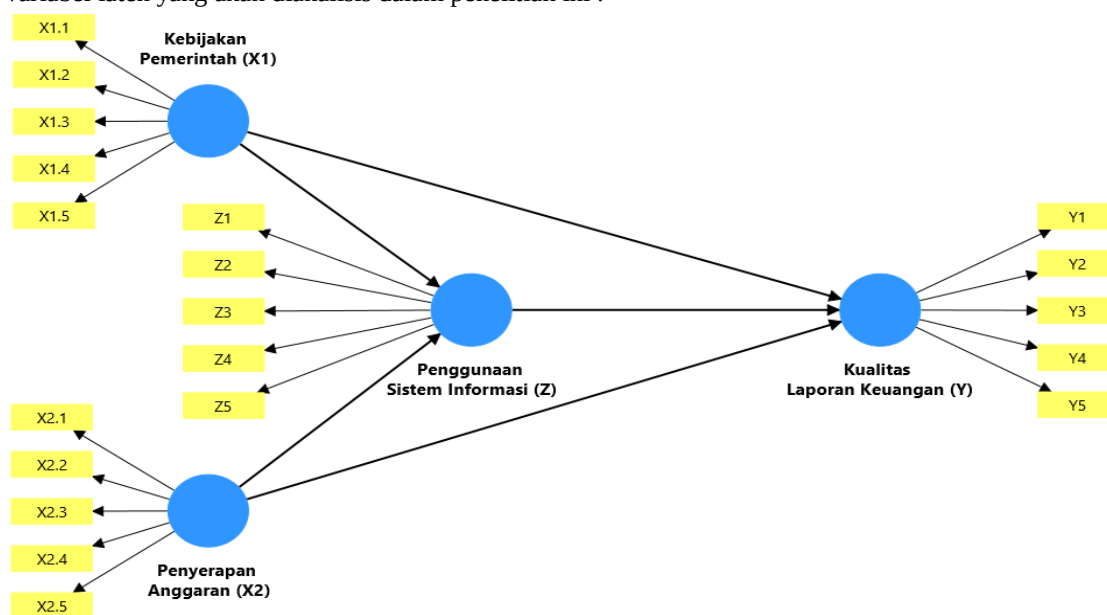
Indikator	Pernyataan	Nilai rata-rata
Y1	Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi - Laporan keuangan di instansi saya disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.	4.6
Y2	Transparansi dan Akurasi Data - Ketersediaan data dalam sistem informasi mendukung transparansi dan akurasi laporan keuangan.	5.0
Y3	Kegunaan untuk Pengambilan Keputusan - Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.	4.8
Y4	Ketepatan Waktu dan Kemudahan Akses - Laporan keuangan di instansi saya disajikan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.	4.6
Y5	Audit dan Prinsip Transparansi serta Akuntabilitas - Laporan keuangan yang dibuat di instansi saya telah diaudit dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.	4.6
Nilai rata-rata variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)		4.72

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil Tabel 4, nilai rata-rata untuk lima pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) menunjukkan hasil yang sangat positif. Nilai rata-rata tertinggi ditemukan pada item pernyataan Y2 yaitu "Ketersediaan data dalam sistem informasi mendukung transparansi dan akurasi laporan keuangan" dengan nilai 5.0, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa

data yang tersedia dalam sistem informasi sangat mendukung transparansi dan akurasi laporan keuangan. Sedangkan nilai rata-rata dari variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 4.72 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan di instansi ini berada pada kategori sangat baik dan memenuhi standar yang diperlukan.

Uji inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasi/berlaku ke seluruh populasi/kelompok yang lebih besar. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4, yang menerapkan metode *Partial Least Squares* (PLS) dan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians. *Partial Least Squares* (PLS) merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam model yang kompleks, sementara *Structural Equation Modeling* (SEM) digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel-variabel yang terlibat. Gambar 2 Merupakan model variabel laten yang akan dianalisis dalam penelitian ini.



Gambar 2 Model Variabel Laten
Sumber : Data diolah, 2025

Evaluasi Model Struktural atau *Inner model* dalam PLS-SEM menggambarkan hubungan antar variabel laten dan dievaluasi untuk melihat kekuatan serta signifikansi hubungan tersebut. Evaluasinya mencakup dua aspek yaitu *R Square* (R^2) dan *Goodness of Fit* (GoF)

e. *R Square* (R^2)

R-Square (R^2) dalam PLS-SEM mengukur seberapa baik variabel independen laten dalam model dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen laten. Nilai *R-Square* (R^2) menunjukkan kekuatan prediktif model secara keseluruhan. Nilai *R-Square* (R^2) berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variansi. Berikut nilai *R-Square* (R^2) dalam analisis ini.

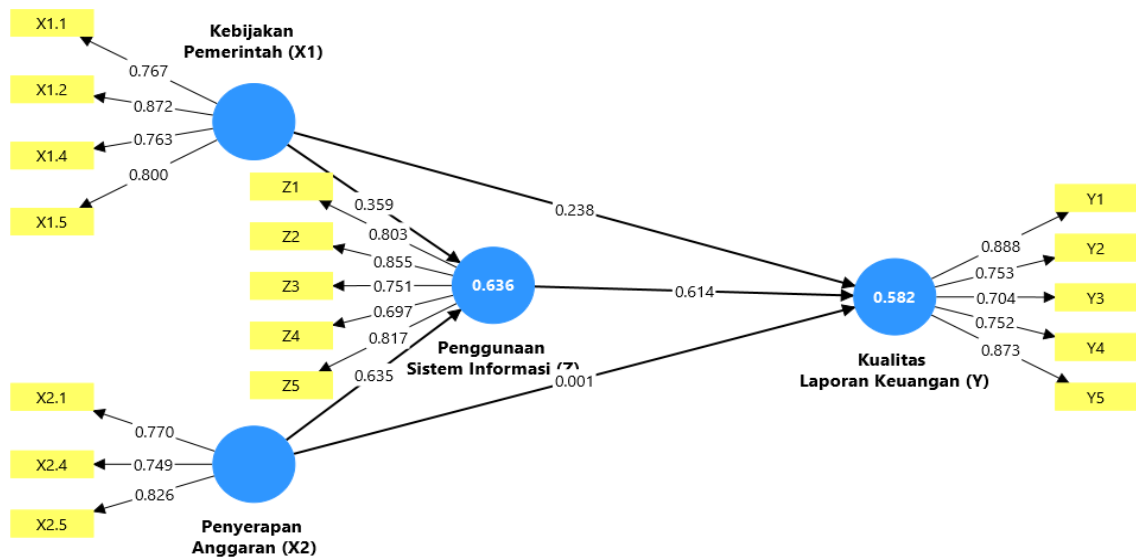
Tabel 7. Hasil Uji *R-Square* (R^2)

Var. Dependen	R-square	R-square adjusted
Kualias Laporan Keuangan (Y)	0.582	0.519
Penggunaan Sistem Informasi (Z)	0.636	0.601

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis diperoleh Nilai *R-Square* (R^2) sebesar 0.582 untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) menunjukkan bahwa 58,2% variasi pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara sisanya 41.8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, sehingga hubungan antara variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) dapat dianggap sangat kuat. Sementara itu, nilai *R-Square* sebesar 0.636 untuk variabel Penggunaan Sistem Informasi (Z) menunjukkan bahwa 63.6% variasi pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, dengan 36.4% dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nilai ini menunjukkan hubungan yang cukup

sedang/moderate, artinya model mampu menjelaskan sebagian besar faktor yang memengaruhi Penggunaan Sistem Informasi (Z), meskipun masih ada banyak pengaruh dari luar model. Berikut gambar 5.2 output model PLS SEM Algorithm untuk melihat R -Square (R^2) model penelitian.



Gambar 3 Outputmodel PLS SEM Algorithm
Sumber : Data diolah, 2025

f. Signifikansi (Pengujian Hipotesis)

1. Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Uji signifikansi hubungan dalam PLS-SEM dilakukan untuk menentukan apakah hubungan antar variabel laten dalam model dapat dianggap signifikan secara statistik. Proses ini biasanya menggunakan teknik bootstrapping, di mana data di-resampling untuk menghitung nilai koefisien jalur (*path coefficient*) dan kesalahan standarnya. Hasilnya dilaporkan dalam bentuk nilai t-statistic atau p-value. Sebuah hubungan dianggap signifikan jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (dalam penelitian ini menggunakan signifikansi 0,05). Koefisien jalur yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen laten memiliki dukungan statistik yang kuat, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Berikut hasil *bootstrapping* model penelitian *direct effect* dan *indirect effect*.

Tabel 8 Hasil *Path Coefficient Bootstrapping direct effect*

Koefisien Jalur	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P values
Kebijakan Pemerintah (X1) → Penggunaan Sistem Informasi (Z)	0.348	0.339	0.133	2.608	0.011
Penyerapan Anggaran (X2) → Penggunaan Sistem Informasi (Z)	0.779	0.781	0.084	9.222	0.000
Kebijakan Pemerintah (X1) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.065	0.107	0.253	0.258	0.797
Penyerapan Anggaran (X2) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	-0.360	-0.378	0.382	0.944	0.348
Penggunaan Sistem Informasi (Z) → Kualitas Laporan keuangan (Y)	1.048	1.045	0.399	2.630	0.010

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Pengaruh Kebijakan Pemerintah (X1) terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z)**
Hasil menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z) dengan nilai koefisien sebesar 0.348, T statistik 2.608 (>1.96), dan P value 0.011 (<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang baik akan meningkatkan penggunaan sistem informasi. Kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dan memperkuat infrastruktur informasi dapat mendorong organisasi untuk lebih banyak memanfaatkan sistem informasi.
- b) **Pengaruh Penyerapan Anggaran (X2) terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z)**
Penyerapan Anggaran (X2) memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z) dengan nilai koefisien sebesar 0.779, T statistik 9.222 (>1.96), dan P value 0.000 (<0.05). Ini menunjukkan bahwa semakin baik Penyerapan anggaran yang dilakukan, semakin tinggi penggunaan sistem informasi. Pengalokasian anggaran yang tepat untuk teknologi dan sistem informasi akan memperbesar peluang untuk penggunaan teknologi yang lebih efektif dalam organisasi.
- c) **Pengaruh Kebijakan Pemerintah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**
Kebijakan Pemerintah (X1) menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0.065, T statistik 0.258 (<1.96), dan P value 0.797 (>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dalam model ini.
- d) **Pengaruh Penyerapan Anggaran (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**
Penyerapan Anggaran (X2) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan nilai koefisien sebesar -0.360, T statistik 0.944 (<1.96), dan P value 0.347 (>0.05). Ini menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun ada hubungan negatif, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk diandalkan dalam model ini.
- e) **Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi (Z) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**
Penggunaan Sistem Informasi (Z) menunjukkan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan nilai koefisien sebesar 1.048, T statistik 6.538 (>1.96), dan P value 0.000 (<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan sistem informasi dalam organisasi, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem informasi yang efektif membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.
2. Hasil *bootstrapping* efek tidak langsung (*Indirect effect*)

Hasil *bootstrapping* efek tidak langsung (*Indirect effect*) dapat dilihat pada Tabel 5.19 sebagai berikut :

Tabel 9 Hasil *Path Coefficient Bootstrapping Indirect effect*

Koefisien Jalur	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kebijakan _Pemerintah (X1) → Kualitas _Laporan Keuangan (Y)	0.220	0.222	0.123	1.791	0.076
Penyerapan _Anggaran (X2) → Kualitas _Laporan Keuangan (Y)	0.390	0.379	0.178	2.187	0.031

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Pengaruh Kebijakan Pemerintah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) melalui Penggunaan Sistem Informasi (Z)**
Hasil analisis menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah (X1) memiliki pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) melalui Penggunaan Sistem Informasi (Z). Nilai koefisien sebesar 0.220, dengan T statistik 1.791 (<1.96), dan P value 0.076 (>0.05), menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung ini tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Artinya, meskipun Kebijakan Pemerintah (X1) dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y), pengaruh tersebut tidak melalui Penggunaan Sistem Informasi (Z) secara signifikan dalam model ini.
- b) **Pengaruh Penyerapan Anggaran (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) melalui Penggunaan Sistem Informasi (Z)**
Penyerapan Anggaran (X2) memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) melalui Penggunaan Sistem Informasi (Z), dengan nilai koefisien sebesar

0.390, T statistik 2.187 (>1.96), dan P value 0.029 (<0.05). Ini menunjukkan bahwa Penyerapan Anggaran (X2) yang baik dapat meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi (Z), yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Peningkatan anggaran yang teralokasi dengan baik untuk pengembangan sistem informasi memperkuat pengaruh Penyerapan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Effect Size (f^2)

Effect size (f^2) digunakan untuk mengevaluasi dampak spesifik variabel independen terhadap prediksi variabel dependen. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat perubahan nilai R^2 setelah variabel independen tertentu dihilangkan dari model. Nilai f^2 diinterpretasikan sebagai kecil jika kurang dari 0,02, sedang jika antara 0,02 dan 0,15, dan besar jika lebih dari 0,35. Dengan menghitung f^2 , peneliti dapat mengidentifikasi variabel independen mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen dalam model, sehingga memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika hubungan antar variabel laten.

Tabel 10 Hasil uji Effect Size (f^2)

Variabel	Penggunaan _Sistem Informasi (Z)	Kualitas _Laporan Keuangan (Y)
Kebijakan _Pemerintah (X1)	0.335	0.096
Penyerapan _Anggaran (X2)	1.052	0.000
Penggunaan _Sistem Informasi (Z)		0.328

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil Tabel 10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengaruh Kebijakan Pemerintah (X1) terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z):

Nilai f^2 untuk jalur ini adalah 0.335, yang menunjukkan pengaruh sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah (X1) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan Penggunaan Sistem Informasi (Z). Meskipun pengaruhnya tidak sebesar pengaruh variabel lain, Kebijakan Pemerintah (X1) berperan dalam mendorong penggunaan sistem informasi dalam organisasi.

b) Pengaruh Kebijakan Pemerintah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y):

Nilai f^2 untuk jalur ini adalah 0.096, yang menunjukkan pengaruh kecil. Artinya, Kebijakan Pemerintah (X1) memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Meskipun kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, pengaruh langsungnya terhadap kualitas tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan variabel lainnya.

c) Pengaruh Penyerapan Anggaran (X2) terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z):

Nilai f^2 untuk jalur ini adalah 1.052, yang menunjukkan pengaruh besar. Hal ini menunjukkan bahwa Penyerapan Anggaran (X2) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z). Peningkatan kualitas dan alokasi anggaran yang tepat memberikan dorongan yang kuat dalam memfasilitasi dan meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam organisasi. Dengan demikian, semakin baik penyerapan anggaran, semakin besar pengaruhnya terhadap penggunaan sistem informasi yang lebih optimal di dalam organisasi.

d) Pengaruh Penyerapan Anggaran (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y):

Nilai f^2 untuk jalur ini adalah 0.000, yang menunjukkan tidak ada pengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyerapan Anggaran (X2) tidak memberikan dampak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Penyerapan anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dalam model ini.

e) Komitmen terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z):

Nilai f^2 untuk jalur ini adalah 0.433, yang menunjukkan pengaruh besar. Komitmen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Penggunaan Sistem Informasi (Z) karyawan. Semakin tinggi tingkat komitmen terhadap organisasi, semakin besar motivasi untuk bekerja dengan baik dan berkontribusi secara maksimal.

f) Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi (Z) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y):

Nilai f^2 untuk jalur ini adalah 0.328, yang menunjukkan pengaruh sedang. Ini menunjukkan bahwa Penggunaan Sistem Informasi (Z) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Penggunaan sistem informasi yang lebih baik cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, berkat kemudahan akses data dan analisis yang lebih akurat.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyerapan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penggunaan Sistem Informasi. Penyerapan Anggaran berkaitan dengan sejauh mana anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang terkait dengan teknologi, seperti pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi, dapat diserap secara efisien. Penggunaan Sistem Informasi menjadi variabel intervening yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan data keuangan dan memastikan laporan keuangan yang lebih baik, lebih akurat, dan lebih tepat waktu. Kualitas Laporan Keuangan adalah indikator utama dalam pengelolaan keuangan yang mencakup keakuratan, ketepatan waktu, dan transparansi laporan keuangan yang disajikan. Responden pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang efisien memungkinkan pengadaan sistem informasi yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, anggaran yang dialokasikan secara tepat mendukung pengembangan sistem informasi yang lebih efisien, yang akhirnya berkontribusi pada kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Widyarningsih & Pramudyo (2022) yang menyatakan bahwa alokasi anggaran yang efisien berkontribusi pada kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan sistem informasi yang lebih baik. Dalam hal ini, Resource Dependence Theory oleh Pfeffer dan Salancik (1978) menegaskan bahwa penyerapan anggaran yang efisien menyediakan sumber daya untuk pengembangan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sementara Schick (1998) mengaitkan keberhasilan implementasi teknologi dengan efektivitas penyerapan anggaran.

Dengan demikian, penyerapan anggaran agar penyerapan anggaran difokuskan pada pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang lebih baik serta pelatihan pegawai agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif. Anggaran yang dialokasikan juga harus digunakan untuk meningkatkan pengelolaan data dan pelaporan keuangan melalui sistem informasi yang lebih efisien dan terintegrasi agar mendukung meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kesimpulan

- 1) Variabel Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Sistem Informasi. Ini berarti semakin baik kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi tingkat penggunaan sistem informasi yang ada di instansi tersebut.
- 2) Variabel Penyerapan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Sistem Informasi. Ini artinya penyerapan anggaran yang efisien memungkinkan pengadaan perangkat teknologi yang lebih baik, yang mendukung penggunaan sistem informasi yang lebih optimal dalam pengelolaan data.
- 3) Variabel Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, meskipun pengaruh ini tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memberikan pedoman untuk pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, kebijakan tersebut tidak cukup kuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara langsung.
- 4) Variabel Penyerapan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Ini berarti meskipun penyerapan anggaran yang efisien penting dalam pengelolaan keuangan, pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan masih terbatas.
- 5) Variabel Penggunaan Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Ini artinya semakin baik penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
- 6) Variabel Kebijakan Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penggunaan Sistem Informasi sebagai variabel intervening. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memberikan arahan, pengaruh langsungnya terhadap kualitas laporan keuangan melalui penggunaan sistem informasi tidak signifikan.
- 7) Variabel Penyerapan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Penggunaan Sistem Informasi. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang efisien mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Saran

Kebijakan yang diterapkan terus diperbarui dengan fokus pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang efisien serta alokasi anggaran yang tepat guna mendukung sistem informasi yang lebih baik. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data dan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat.

Daftar Pustaka

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2011). *Management Control Systems*. McGraw-Hill.
- Damanik, F. (2023). Efektivitas penggunaan sistem informasi sebagai mediasi hubungan realisasi anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(3), 153–168.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Mardiasmo, D. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara*. Andi Offset.
- Nurfadilah, F., & Handayani, R. (2022). Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintah. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(1), 45-59.
- Rahmawati, D., & Prabowo, B. (2021). Pengaruh penyerapan anggaran terhadap penggunaan sistem informasi di pemerintahan. *Jurnal Administrasi Keuangan Negara*, 11(3), 210-222.
- Sari, N., & Arfan, A. (2021). Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan melalui penggunaan sistem informasi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 18(1), 60-72.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Mc Rae, D., & Wilde, C. (1979). The administrative framework and budgeting system: A comparison of systems. *Journal of Public Administration*, 57(1), 68-89.
- Dye, Thomas. R. (1972). *The Politics of the Budgetary Process*. Little, Brown and Company.
- Parker, L. (1995). The politics of budgeting: An overview. *Public Budgeting & Finance*, 15(1), 3-19.
- Wildavsky, A. (1979). *The Politics of the Budgetary Process*. Little, Brown and Company.
- Tri Ikyarti, D., & Nila Aprila, R. (2019). Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 12(3), 102-115.
- Moon, M. J., & Norris, D. F. (2005). Does managerial capacity matter? A study of public administration performance in a developing economy. *Public Administration Review*, 65(3), 300-308.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research* (12th ed.). Wadsworth Cengage Learning.